

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian ditunjukkan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin, dimana pembangunan ekonomi sebagai penggerak utama seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, dan serasi dengan keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan yang sudah dicapai dalam bidang ekonomi tersebut tentunya tidak akan lepas dari peran serta masing-masing pelaku ekonomi yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), koperasi, dan juga peran masyarakat yang terlibat di dalamnya. Salah satu pihak yang berperan dalam mengembangkan perekonomian adalah koperasi.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama menjalankan usaha untuk mencapai kesejahteraan jasmaniah para anggotanya dengan berdasar atas asas kekeluargaan dan melandaskan kegiatannya berdasarkan atas prinsip koperasi.

Koperasi diambil dari kata co-operation yang berarti kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kerjasama pada koperasi secara umum disimpulkan sebagai kerjasama dalam kegiatan ekonomi, tetapi tidak semua bentuk organisasi kerjasama ekonomi dapat disebut sebagai koperasi (Prof. Dr. Ramudi Ariffin, 2013:22). Menurut Subandi (2018:18) Koperasi adalah bentuk kegiatan usaha yang paling ideal di mana anggotanya juga bertindak sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sekaligus sebagai pemilik.

Ditegaskan dalam **Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada bab I pasal 1, bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.**

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam mengoperasionalkan kegiatannya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Setiap akhir tahun, anggota akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang merupakan keuntungan yang diperoleh koperasi, berasal dari uang administrasi. Masing-masing anggota koperasi menerima jumlah Sisa Hasil Usaha berdasarkan perhitungan dari seberapa besar intensitas anggota melakukan transaksi dengan koperasi, dan juga berdasarkan besarnya simpanan dari masing-masing anggota.

Menurut Rudianto (2012:4) akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan pada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dari kondisi suatu perusahaan. Dalam era globalisasi, kebutuhan akan sistem akuntansi semakin dirasa penting, Globalisasi memerlukan suatu standar akuntansi internasional yang digunakan untuk mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan informasi

akuntansi pada suatu organisasi bisnis yang mengglobal agar semakin relevan dengan kebutuhan para penggunanya, termasuk organisasi koperasi.

Sedangkan akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyediaan informasi bagi manajemen untuk mengelola suatu organisasi (perusahaan) dan membantu dalam memecahkan masalah-masalah khusus yang dihadapi suatu organisasi. (Masiyah Kholmi, 2013:1). Manajer adalah pihak internal suatu organisasi yang memimpin dan mengendalikan operasi organisasi serta bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Maka dari itu, pihak manajemen berkepentingan terhadap informasi akuntansi untuk menilai efisiensi dan evaluasi aktivitas suatu organisasi. Karena adanya keterbatasan informasi dalam akuntansi keuangan, seperti penggunaan data historis dan laporan tidak terperinci, maka untuk kelengkapan informasi bagi pihak manajemen muncullah akuntansi manajemen ini.

Informasi akuntansi manajemen merupakan komponen organisasi yang dirancang untuk mengolah data keuangan menjadi informasi atau laporan keuangan, yang ditunjukkan kepada pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan (Mulyadi, 2008:8). Data dapat diolah menjadi informasi dengan bantuan perangkat komputer. Bentuk dan format laporan keuangan untuk pihak ekstern lebih baku dibanding laporan perubahan posisi keuangan dan berbagai fungsi informasi pendukung, sedangkan laporan intern bentuknya lebih bervariasi, misalnya laporan penjualan harian, laporan pembelian secara kredit dan tunai, dan laporan pembayaran gaji.

Piutang suatu perusahaan pada umumnya merupakan salah satu aktiva yang bernilai besar dari aktiva lancar, sekaligus bagian terbesar dari total aktiva. Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat diterima

dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan (Mulyadi, 2002:87). Pemberian piutang juga mengandung resiko bagi perusahaan berupa kerugian apabila debitur tidak membayar kewajibannya.

Piutang merupakan unsur penting dalam neraca, prosedur yang wajar dan cara pengamanan yang cukup terhadap piutang sangat penting, bukan saja untuk keberhasilan perusahaan, tetapi juga untuk memelihara hubungan yang memuaskan dengan pelanggan. Piutang biasanya timbul karena adanya transaksi secara kredit antara anggota dan koperasi, biasanya sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama untuk aturan dan tata cara. Akan tetapi dalam menjalankan usahanya sering kali koperasi mengalami berbagai masalah, hal itu merupakan hambatan yang dapat mengganggu kelancaran hidup koperasi, dimana setiap masalah yang timbul harus segera diatasi dengan mencari jalan keluar atau pemecahannya.

Piutang tak tertagih merupakan piutang yang menimbulkan kerugian bagi koperasi karena debitur tidak mau atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya (Jusup, I. Haryono; 2002). Mengenai piutang tak tertagih, tentu tidak ada perusahaan yang menginginkan adanya pelanggan yang tidak membayar lunas utang atau kewajiban, meskipun pada proses pemberian kredit perusahaan telah dilakukan analisis secara teliti. Resiko piutang tak tertagih akan terjadi, maka dari itu perusahaan membuat daftar piutang berdasarkan umur piutangnya sebagai upaya untuk memudahkan perusahaan dalam melakukan perhitungan atas piutang dan cadangan atau penyisihan kerugian piutang yang akan dibebankan pada akhir periode. Maka dari itu, evaluasi akuntansi manajemen perlu dilakukan sebagai

upaya untuk memberikan informasi mengenai informasi akuntansi khususnya piutang yang memiliki masalah dalam penagihannya.

Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) Kota Bandung merupakan koperasi produsen yang unit usahanya berupa penyaluran kedelai kepada anggota dan calon anggotanya. Namun bukan hanya itu saja, KOPTI Kota Bandung juga memiliki unit usaha lainnya, diantaranya:

1. Usaha Kedelai

Merupakan penjualan/penyaluran kedelai kepada anggota dan calon anggota di lima sentra pelayanan usaha, yaitu di Bojongloa, Babakan, Cibolerang, Sukahaji, Antapani dan di Gudang KOPTI Kota Bandung.

2. Usaha Non Kedelai

- a. Pengadaan ragi tempe
- b. Kerjasama pemanfaatan GOR
- c. Kerjasama pemanfaatan bangunan di Antapani
- d. Kerjasama pemanfaatan pabrik tahu di Jl Terusan Suryani
- e. Kerjasama pemanfaatan pabrik tempe, kerangkeng dan gilingan tahu di Cibolerang.

3. Usaha Simpan Pinjam (USP)

Membantu anggota/masyarakat dalam memenuhi modal dan kebutuhan lainnya.

Pada unit usaha KOPTI Kota Bandung, sistem kredit terjadi pada unit usaha simpan pinjam. Unit usaha simpan pinjam pada KOPTI Kota Bandung memiliki tujuan untuk membantu anggota/masyarakat dalam memenuhi modal dan

kebutuhan lainnya agar memberikan manfaat berupa meningkatnya usaha anggota dan terpenuhinya kebutuhan anggota, dengan bunga yang dibebankan kepada anggota sebesar 2% untuk anggota dan 2,5 % untuk calon anggota, serta terdapat jaminan berupa, sertifikat, surat BPKB, surat AJB, dan sejenisnya jika pinjaman diatas 2 juta rupiah. Pada KOPTI Kota Bandung, piutang dikatakan tak tertagih ketika umur piutang sudah melebihi 12 bulan atau satu tahun setelah habis waktu jatuh tempo.

Oleh karena itu, pengurus koperasi terutama bagian manajemen ikut bertanggungjawab terhadap keberhasilan anggotanya dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya. Maka koperasi harus melakukan beberapa prosedur dan harus memperhitungkan faktor-faktor yang meyakinkan dalam pemberian kredit untuk memastikan bahwa calon debitur tersebut layak atau tidak diberikan pinjaman.

Koperasi dalam memberikan kreditnya harus selektif, karena dengan selektifnya memilih calon debitur dalam pemberian kredit, akan memberikan dampak positif dan dampak mengurangi terjadinya risiko kredit macet. Misalnya seperti masalah kurangnya pertimbangan keputusan dalam pemberian kredit masih sering terjadi yaitu dengan adanya kemudahan dalam pemberian kredit kepada calon kreditur. Hal ini mengakibatkan adanya calon debitur yang terlambat dalam pembayaran pinjaman kredit yang mengakibatkan kredit macet.

Permasalahan yang muncul di KOPTI Kota Bandung adalah partisipasi anggota sebagai pelanggan. Partisipasi anggota sebagai pelanggan dalam bentuk

transaksi usaha yaitu melakukan peminjaman setiap tahunnya cukup besar, namun kesadaran anggota dalam melakukan pembayaran bisa dikatakan rendah karena jumlah piutang macet pada KOPTI Kota Bandung tergolong besar.

Berikut data tabel jumlah pinjaman bermasalah anggota KOPTI Kota Bandung dari tahun 2016-2020:

Tabel 1. Piutang Anggota Unit Simpan Pinjam KOPTI Kota Bandung Tahun 2016-2020

| Tahun | Total Piutang | Piutang Lancar | Piutang Macet | Penyisihan Piutang Tak Tertagih | Non Performing Loan (NPL) % |
|-------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 2016 | 843.676.756 | 590.800.091 | 326.788.024 | -73.911.359 | 29,97% |
| 2017 | 899.015.863 | 674.691.698 | 318.235.524 | -93.911.359 | 24,95% |
| 2018 | 1.057.889.238 | 871.769.000 | 339.332.221 | -153.211.983 | 17,59% |
| 2019 | 1.118.428.376 | 884.139.138 | 387.501.221 | -153.211.983 | 20,95% |
| 2020 | 997.957.206 | 851.602.580 | 332.217.759 | -185.863.133 | 14,67% |

Sumber: KOPTI Kota Bandung Tahun 2016-2020

Menurut keputusan Menteri (KEPMEN) No. 14/Per/M>KUKM/XII/2009, tanggal 14 Desember 2009 tentang pedoman penilaian kesehatan KSP/USP menyatakan bahwa pinjaman lancar minimal 90% dari pinjaman yang diberikan. Dengan kata lain besarnya pinjaman bermasalah maksimal 10% dari pinjaman yang diberikan.

Sedangkan pada tabel yang sudah dipaparkan mengenai jumlah piutang bermasalah pada KOPTI kota Bandung, dapat dilihat pada tahun 2016 sebesar 36%, tahun 2017 sebesar 32%, tahun 2018 sebesar 29%, tahun 2019 sebesar 30%, dan

pada tahun 2020 sebesar 28%. Maka dapat disimpulkan jika besarnya pinjaman yang diberikan KOPTI Kota Bandung melebihi batas maksimum yang sudah diatur KEPMEN mengenai pedoman penilaian kesehatan KSP/USP yaitu sebesar 10%.

Timbulnya kredit macet sendiri disebabkan oleh para anggota yang tidak mau membayar kewajibannya karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor ini antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Pratama *et al.* (2015), faktor internal meliputi sumber daya manusia (karyawan/petugas), rendahnya kemampuan pihak koperasi dalam melakukan analisis permohonan kredit, lemahnya sistem informasi dan pengawasan serta administrasi kredit, adanya campur tangan dalam keputusan kredit, ketidakmampuan dalam manajemen, suku bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan komitmen anggota koperasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan dari faktor eksternal meliputi adanya kegagalan musibah yang menimpa nasabah, adanya itikad tidak baik dari pihak nasabah adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan pihak keluarga atau kerabat, adanya penyalahgunaan kredit oleh nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara pada pihak KOPTI Kota Bandung penggunaan informasi akuntansi manajemen sudah mulai digunakan pada tahun 2015 sampai dengan sekarang, sedangkan sebelumnya koperasi masih menggunakan pola tradisional. Maka dari beberapa data yang sudah diperoleh muncul dugaan bahwa manajemen koperasi belum menggunakan informasi yang dihasilkan akuntansi manajemen secara efektif untuk mengambil keputusan. Maka analisis mengenai evaluasi penerapan akuntansi manajemen pada unit usaha simpan

pinjam KOPTI Kota Bandung sangat diperlukan, sebagai upaya menekan tingkat resiko pembayaran macet yang dapat berisiko menjadi menjadi piutang tak tertagih.

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan Evaluasi Penerapan Akuntansi Manajemen Terhadap Piutang Tak Tertagih, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irene Garlinitya, Oktavianus Nawa Pau, dan Christian C. Foenay (2018) dengan judul Manfaat Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen Pada Koperasi Kredit Perempuan Alfa Omega Kabupaten Kupang dengan hasil variabel kualitas akuntansi manajemen yang bersifat akurat telah memenuhi ciri khusus informasi akuntansi manajemen yaitu penyajian jujur, netral, pertimbangan sehat, telah dipenuhi oleh koperasi kredit perempuan alfa omega.

Grace Gloria P. Tampi, Ingriani Elim, Meily Y.B Kalalo. (2019). dengan judul Analisis Piutang Tak Tertagih dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) TBK Cabang Manado dengan hasil piutang tak tertagih akan berdampak pada laporan laba/rugi dan neraca. Selain itu, bank dapat mengetahui besarnya beban piutang tak tertagih dan besarnya cadangan umur piutang tak tertagih.

Maka berdasarkan fenomena di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan akuntansi manajemen terhadap piutang tak tertagih dengan judul **“Evaluasi Penerapan Akuntansi Manajemen Terhadap Piutang Tak Tertagih Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Tahun 2016-2020 (Studi Kasus Pada Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia Kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Bagaimana sistem akuntansi manajemen pada KOPTI Kota Bandung pada saat ini.
2. Sejauh mana upaya yang dilakukan KOPTI Kota Bandung untuk menekan piutang tak tertagih pada unit usaha simpan pinjam.
3. Apa dampak piutang tak tertagih terhadap unit simpan pinjam KOPTI Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Untuk menggambarkan Penerapan Akuntansi Manajemen Terhadap Piutang Tak Tertagih Pada Unit Simpan Pinjam KOPTI Kota Bandung Tahun 2016-2020.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui informasi akuntansi manajemen pada KOPTI Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui sejauh mana upaya KOPTI Kota Bandung dalam menekan piutang tak tertagih pada unit simpan pinjam.
3. Untuk mengetahui dampak dari piutang tak tertagih terhadap KOPTI Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pemahaman yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti lain dan bagi yang ingin mengetahui wawasan mengenai masalah yang diteliti sebagai informasi dan referensi untuk melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Koperasi, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atas saran-saran yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan akuntansi manajemen pada piutang tak tertagih di masa yang akan datang.
2. Bagi institusi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan baru dan pengembangan ilmu mengenai permasalahan yang diteliti dan juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi penulis selanjutnya.
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai permasalahan yang diteliti.
4. Bagi calon peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya atau sejenis. Serta sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan